

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Arifin, Z. (2011). *Penelitian Pendidikan (Metode dan Paradigma Baru)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Azwar, S. (1995). *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Bologna, J. (2006). *Fraud auditing and forensic accounting*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Kualitatif, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karsona, A. M. (2011). *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Mendikbud.
- Klitgard. (2015). *Controlling Corruption*. The Regents of the University of California: All rights reserved.
- Miles, & Huberman. (1984). Drawing Valid Meaning From Qualitative Data : Toward a Shared Craft. *Educational Researcher*, 20-30.
- Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Prawiradilaga, & Siregar. (2004). *Mozaik Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Thoha, M. (2011). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada .
- Widjaja, H. A. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal:**

- Azhar, M. (2019). Implikasi Penyalagunaan Wewenang Administrasi Dalam Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak. *Administrative Law & Governance Journal Vol. 2 No. 3*, 450-453.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis Dan Legal. *Jurnal Analisis Sosial Politik Vol. 5 No. 1*, 20-33.
- Darmanto, A. (2019). Pengisian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan

- Pemberhentian Perangkat Desa Tahun 2018 Suatu Kajian Perkara No.54/G/2018/Ptun.Smg. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 66-77.
- Kushandajani. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2 (1), 53-64.
- Lestari, S. I., & Haryono. (2022). Tindak Korupsi: Budaya Praktik Gratifikasi Dalam Pelayanan Administrasi Masyarakat (Analisis Sosiologi Korupsi). *Jurnal Cahya Mandalika*, 3(2), 120-125.
- Mapuasari, S. A., & Mahmudah, H. (2018). Korupsi Berjamaah: Konsesus Sosial atau Gratifikasi dan Suap. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 159-176.
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 84-96.
- Pranatawijaya, V. H., Widiatry, W., Priskila, R., & Putra, P. B. A. A. (2019). Pengembangan Aplikasi Kuesioner Survey Berbasis Web Menggunakan Skala Likert dan Guttman. *Jurnal Sains Dan Informatika*, 5(2), 128-137.
- Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama Dalam Kontestasi PILGUB Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan Pengetahuan Foucolt. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 18(2), 186-200.
- Romadhoni, A., & Haerah, K. (2022). Praktik Jual Beli Jabatan Dan Dampaknya Terhadap Birokrasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). 1-17.
- Syafutra, A., Priyatno, H., & Retno, N. (2014). Persepsi Mahasiswa FISIP Undip Terhadap Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM. *Journal of Politic and Govenmen Studies*, 3(3), 385-395.
- Tian, Q. (2008). Perception of Business Bribery in China: the Impact of Moral Philosophy. *Journal of Business Ehtics*, 80, 437-445.
- Xiao, A. (2018). Konsep interaksi sosial dalam komunikasi, teknologi, masyarakat. *Jurnal Komunika: Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2), 94-99.
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17 (9), 26-42.

### **Peraturan:**

- Demak. *Peraturan Bupati Demak No. 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019*

Demak. *Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perda Kab. Demak No. 1 tahun 2018.*

Indonesia. *Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU NO. 20 Tahun 2001.*

Indonesia. *Undang-Undang tentang Desa, UU No. 6 tahun 2014.*

**DLL:**

Radarsemarang.jawapos.com. (2021, Januari 15). *Terima Gratifikasi Dua Kades Dicapot*. Diambil kembali dari Jawa Pos radarsemarang.id: <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/demak/2021/01/15/terima-gratifikasi-dua-kades-dicapot/>